

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan sistem zonasi PPDB belum akuntabel. Sistem zonasi PPDB memiliki tujuan untuk memberikan pemerataan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat pada suatu wilayah sehingga anak-anak tidak perlu mencari sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Hasil analisis dengan model *performance based accountability* menunjukkan bahwa beberapa tujuan sistem zonasi PPDB belum bisa terwujud. Akuntabilitas yang rendah dapat dibuktikan dari hasil analisis dengan menggunakan variable kejelasan outcome, kejelasan output, mekanisme pengukuran kinerja, keterkaitan output dan outcome, kejelasan standar kinerja, mekanisme perbaikan kinerja, kejelasan tanggung jawab, keterhubungan input dengan output sebagai berikut:

1. Kejelasan outcome: pelaksanaan sistem zonasi PPDB belum memiliki kejelasan tujuan secara terfokus dan konsisten. Hal ini dikarenakan kebijakan sistem zonasi PPDB justru hanya menambah masalah baru yang sebelumnya tidak terjadi pada pelaksanaan PPDB.
2. Kejelasan output: dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB, keberhasilan output diukur dengan empat indikator. Dari keempat indikator, seluruhnya belum terlaksana dengan baik. Meskipun calon siswa bisa dengan mudah mengakses situs web PPDB namun tetap terjadi kendala dalam proses input

data, sistem zonasi PPDB juga belum dapat mencakup seluruh kelompok sasaran karena keterbatasan kuota sekolah. Pelaksanaan sistem zonasi PPDB juga menimbulkan penyimpangan baru sehingga terdapat ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

3. Terdapat mekanisme kinerja yang efektif: sekolah memiliki mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan kriteria pengukuran kinerja. Meskipun pelaksanaan sistem zonasi belum berjalan secara efektif, namun SMAN 9 Bogor sudah menggunakan sumber daya secara baik dalam pencapaian tujuan. Sehingga pelaksanaan zonasi dapat berjalan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Keterkaitan output dan outcome: output yang dihasilkan dari sistem zonasi PPDB bertolak belakang dengan outcome yang diharapkan. Sistem pendukung pelaksanaan sistem zonasi dalam hal ini administrasi kependudukan dan infrastruktur sekolah masih belum memadai sehingga output yang dihasilkan tidak mengarah pada outcome.
5. Kejelasan standar kinerja: kinerja program sistem zonasi PPDB belum sepenuhnya mencapai target karena masih terdapat kendala pada pemerataan sebaran tenaga pendidik .
6. Terdapat mekanisme perbaikan kinerja: sekolah telah memiliki perencanaan pelaksanaan sistem zonasi untuk meningkatkan kinerja saat program berjalan. Meskipun masih terjadi kendala, pelaksanaan sistem zonasi PPDB semakin kondusif setiap tahunnya.

7. Kejelasan tanggung jawab kinerja: sekolah maupun dinas sudah memiliki kejelasan tanggung jawab kinerja karena setiap individu mendapatkan tugas sesuai dengan keahliannya.
8. Menghubungkan input dengan output: input atau sumber daya dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB belum memadai. Masih terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan sumber daya sehingga output zonasi sekolah belum bisa tercapai.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam sistem zonasi PPDB yaitu:

1. Pemerintah perlu memiliki konsistensi tujuan yang lebih terfokus pada masalah yang membutuhkan solusi, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak saling bertentangan
2. Diperlukan dukungan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia akan sangat mendukung keberhasilan suatu kebijakan
3. Pemerintah harus menjamin validitas administrasi data kependudukan untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi data kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

### Buku

Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung*

*Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok:

Rajawali Pers

BPS. 2020. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan*. Jakarta: Badan Pusat

Statistik

Creswell, W John. 2011. *Educational Research: Planning, Conducting, and*

*Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson

Elfindri, dkk. 2008. *Strategi Sukses Membangun Daerah*. Gorgia Media

LAN. 2015. *Akuntabilitas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Miles, M.B dan A.M Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Tjetjep Rohendi

Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia

- Muslimin, Machmud. 2016. *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Selaras
- Mustafa, P. S., H. Gusdiyanto, A. Victoria, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2020
- Nugroho, R. 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Patarai, Idris. 2020. *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. De La Macca
- Patarai, Idris. 2015. *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar: De La Macca
- Peters, B. Guy dalam Anwar Shah. 2007. *Performance Accountability and Combating Corruption (Public Sector Governance and Accountability)*. Washington DC: The World Bank.
- Rochaety, Ety, P, Rahayuningsih, dan P.G. Yanti. 2010. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Santoso, Purwanto 2010. *Modul Pembelajaran Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suryadi, Ace dan H.A.R Tilaar. 2003. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

### **Sumber Media Internet**

Kemendikbud. *Percepatan Peningkatan Akses dan Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Zonasi Pendidikan* [PPT File], <file:///C:/Users/User/Downloads/FMB9%20KEMENDIKBUD%20-%20Semua%20Bisa%20Sekolah.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021

Kemendikbud. *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\\_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B\\_.pdf](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf), diakses pada tanggal 30 Mei 2021

KOMINFO. *Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas*. [https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr) diakses pada 17 Juni 2021

Sudarno, Achmad. *Wali Kota Bogor Sebut Sistem Zonasi PPDB SMA Ada Kelemahan, Ini Alasannya*,  
<https://www.liputan6.com/news/read/4002482/wali-kota-bogor-sebut-sistem-zonasi-ppdb-sma-ada-kelemahan-ini-alasannya> diakses pada 30 Mei 2021

Susianti, Dede. *Tahun Depan, Pemkot Bogor Tolak Zonasi PPDB SMA*,  
<https://mediaindonesia.com/megapolitan/244510/tahun-depan-pemkot-bogor-tolak-zonasi-ppdb-sma> diakses pada 23 Juni 2021

Sumardiyani, Windiyanti, R. *Dugaan Manipulasi Administrasi PPDB di Kota Bogor Menyeruak*,  
<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01314193/dugaan-manipulasi-administrasi-ppdb-di-kota-bogor-menyeruak>  
diakses pada 30 Mei 2021

### **Dokumen**

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Barat